

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Implikasi Tindak Pidana Diluar Kuhp Terhadap Fungsi Dan Peranan Pasal 103 Kuhp Dalam Rangka Pembangunan Hukum Indonesia, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitanya dengan Pasal 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami hambatan dan solusi dalam implikasi Tindak Pidana di luar KUHP kaitannya dengan Pasal 103 KUHP dalam rangka pembangunan Hukum Indonesia

Metode penelitian menggunakan pendekatan *juridis normatif*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui Studi Kepustakaan dan dianalisis dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa : Implikasi Tindak Pidana Diluar KUHP Kaitannya dengan Pasal 103 KUHP dalam rangka Pembangunan Hukum Indonesia, Pasal 103 KUHP sering disebut atau diistilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam bab I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Dengan adanya Pasal 103 Pembangunan Hukum Indonesia sangatlah terbantu, dikarenakan Perubahan zaman yang terus berubah-ubah sehingga semakin banyaknya kejahatan atau tindak kriminalitas baru yang tidak diatur dalam KUHP dapat dicegah dan dapat dibuatnya Hukum khusus yang mengatur tindak Pidana diluar KUHP. Kendala dan solusi dalam Implikasi Tindak Pidana diluar KUHP kaitannya dengan pasal 103 KUHP dalam Pembangunan Hukum Indonesia, Pembangunan Hukum Indonesia akan berjalan dengan baik jika Sistem Hukum dan Penegak Hukumnya tersingkron dengan baik sehingga dapat terwujudnya Pembangunan sebuah Hukum yang baik. Tapi pada kenyataannya masih ada Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif, penegak hukum, sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap, Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud, Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien, lamanya penanganan terhadap perkara, untuk mengatasi itu semua yang dapat dilakukan adalah Perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga Negara Indonesia dan Aparatur penegak hukum, Turut andilnya pihak – pihak terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam pensosialisasian hukum ke masyarakat awam dan Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan , hitam putih. Akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi,

Kata Kunci : Implikasi, Tindak Pidana Diluar Kuhp, Pembangunan Hukum Indonesia, Pasal : 103 KUHP

ABSTRACT

This research entitled Implications of Criminal Actions Outside the Criminal Code on the Function and Role of Article 103 Kuhp in the Context of Indonesian Legal Development, this thesis aims to identify and understand the implications of criminal acts outside the Criminal Code in relation to Article 103 of the Criminal Code in the framework of developing Indonesian Law and to know and understand the obstacles and solutions in the implications of criminal acts outside the Criminal Code in relation to Article 103 of the Criminal Code in the context of the development of Indonesian Law

The research method used a normative juridical approach. Data sources were obtained from several stages, namely through literature study and analyzed in a systematic way including data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research show that: Implications of Criminal Actions Outside the Criminal Code Relating to Article 103 of the Criminal Code in the context of Indonesian Law Development, Article 103 of the Criminal Code is often referred to or termed as a bridge article for regulations or laws that regulate criminal law outside the KUHP. Article 103 of the Criminal Code is in book I of the General Rules of the Criminal Code, which contains terms that are often used in criminal law. This article bridges that all terms / meanings contained in chapters I-VIII of book one of the Criminal Code can be used if it is not regulated otherwise in the law or the rules governing criminal law outside the KUHP. The existence of Article 103 of the Development of Indonesian Law is greatly helped, due to the changing times so that the increasing number of new crimes or crimes that are not regulated in the Criminal Code can be prevented and special laws that regulate crimes outside the Criminal Code can be made. Constraints and solutions in the implications of criminal acts outside the Criminal Code are related to article 103 of the Criminal Code in Indonesian Law Development, Indonesian Legal Development will run well if the Legal System and Law Enforcement are well synchronized so that the development of a good law can be realized. But in reality there is still law enforcement carried out in a discriminatory manner, law enforcers, very vulnerable and open to opportunities for corruption or bribery practices, the independence of the judiciary as the last bastion for justice seekers has not been realized, discretionary authority possessed by law enforcement agencies without control, Management of the handling of legal cases is not yet effective and efficient, the length of time for handling cases, to overcome this all that can be done is the need for moral improvement for all Indonesian citizens and law enforcement officials, the involvement of related parties, namely the Police, Attorney General's Office, and Justice in the socialization of law to the general public and Law should not be enforced in the most rigid, arrogant, black and white form. But it must be based on a high sense of justice,

Keywords: Implication, Crime Outside Kuhp, Indonesian Law Development, Pasal : 103 KUHP